

Diterima: 30 June 2023 Direvisi: 07 July 2023 Disetujui: 07 July 2023 Dipublikasi: 08 July 2023

EFEK MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI ATAS HUBUNGAN PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, PELAPORAN, EVALUASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Wendra Aliffandi^{1*}, Hasni Yusrianti²⁾, Emylia Yuniarti³⁾

¹²³Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

Korespondensi Email^{1*}: wen.darwis@gmail.com

Email²: hasniyusrianti@unsri.ac.id

Email³: emylian_yuniarti@fe.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintahan Kota Palembang sebanyak 52 OPD. Sampel menggunakan kriteria dan setiap OPD diambil sebanyak 3 orang sehingga totalnya berjumlah 156. Teknik analisis menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung hanya variabel teknologi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan variabel perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Teknologi informasi hanya mampu memoderasi hubungan variabel perencanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja sedangkan variabel lainnya teknologi informasi tidak mampu memoderasinya.

Kata Kunci: Perencanaan, Implementasi, Pelaporan, Evaluasi, Teknologi Informasi, Akuntabilitas Kinerja

THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY MODERATION ON RELATIONSHIP PLANNING, IMPLEMENTATION, REPORTING, BUDGET EVALUATION ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY

Abstract

This study aims to determine the effect of information technology moderation on the relationship between planning, implementation, reporting and evaluation of the budget on performance accountability of the Regional Government of Palembang City. The population in this study were all Regional Apparatus Organizations (OPD) within the scope of Palembang City Government as many as 52 OPD. The sample used the criteria and 3 people were taken from each OPD so that a total of 156. The analysis technique used SEM PLS. The results of the study show that directly only the technology variable that influences performance accountability while the planning, implementation, reporting and evaluation variables do not affect performance accountability. Information technology is only able to moderate the relationship between budget planning and performance accountability variables, while other variables, information technology is not able to moderate it.

Keywords: Planning, Implementation, Reporting, Evaluation, Information Technology, Performance Accountability

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kinerjanya pada pertumbuhan ekonomi konsisten positif, mengindikasikan Indonesia pulih. Gejolak ketidakpastian global mampu diredam dengan pertumbuhan ekonomi yang tembus melebihi 5% pada kuartal II tahun 2022. Diprediksi terus tumbuh hingga akhir tahun. Anggaran pemulihan ekonomi tangguh menahan guncangan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Empat ratus lima puluh lima triliun disiapkan tahun ini untuk memberikan bantuan bagi masyarakat, penanganan kesehatan sekaligus memperkuat pulihnya perniagaan negeri ini. Capaian ini pun diikuti oleh surplus neraca dagang di sektor perindustrian. Performa ekonomi Indonesia pun kian meyakinkan dan menciptakan optimisme (Staf Kepresidenan Republik Indonesia, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, Pemerintah Kota Palembang melakukan revaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 menunjukkan hasil dari 10 sasaran strategis hanya 3 sasaran yang tercapai 100% yaitu 1) Kebutuhan infrastruktur (122,77%); 2) Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan (101,03%) dan 3) Terlaksananya *Good Governance Practices* dan Reformasi Birokrasi (100%). Sedangkan sisanya masih belum tercapai, hal ini dikarenakan untuk penurunan pertumbuhan IPM Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dikarenakan 1) adanya pandemi covid-19; 2) ditundanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja secara langsung; 3) kurangnya anggaran peningkatan sumber daya manusia; 4) rendahnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan; dan 5) tidak seimbangnyalah lapangan pekerjaan yang tersedia (Bagian Organisasi Setda Kota Palembang, 2021).

Capaian kinerja gerakan Shalat Subuh Berjamaah menurun dari target yang ditetapkan akibat pengaruh dari pandemi Covid 19 dimana masyarakat maupun aparatur tidak banyak yang melaksanakan shalat berjamaah di Masjid maupun Mushollah sehingga aplikasi Si Abuh banyak tidak digunakan. Terjadinya penurunan jumlah investasi di Kota Palembang hal ini dikarenakan banyaknya investor tidak melapor ke PMDN/PMA sehingga data yang disampaikan ke LKPM tidak mengalami penambahan investasi. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mencapai 182,61 ribu orang (10,89 persen). Meningkat sebesar 1,94 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 180,67 ribu orang (10,90 persen). Hal ini dikarenakan 1) kurang tepat sasaran program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD; 2) hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bisnis rumah tangga terhalang dalam hal permodalan (Bagian Organisasi Setda Kota Palembang, 2021).

Persentase Penilaian Kesehatan koperasi sebesar 61,33% dari target sebesar 84,66%, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 72,44% dengan koperasi yang dinilai kesehatannya sebesar 92 koperasi dari target sebesar 150 koperasi. Kondisi tidak tercapai ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan rapat anggota tahunan dan keterlambatan penyampaian laporan tahunan koperasi sehingga penilaian

kesehatan koperasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai target. Minat kunjungan wisatawan ke Kota Palembang apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sangat menurun sekitar 49% dan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu yang menyebabkan 30 event wisata di Palembang batal digelar. Pada 2020 ditargetkan 2,4 juta wisatawan, namun hanya 895.912 ribu wisatawan yang datang, artinya hanya 37,33%. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 12.500.000 Jiwa maka capaian kinerja Tahun 2020 masih berada pada posisi 7,2% (Bagian Organisasi Setda Kota Palembang, 2021).

Berbagai penelitian menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban anggaran (Wibisono, 2016), evaluasi kinerja (Utami, 2017), pengendalian akuntansi (Fathia, 2017) (Gani, 2020), sistem informasi pengelolaan keuangan (Yuliani, 2018), penyerapan anggaran (Fadhilatunnisa, Suwondo, & Novianty, 2021), pendanaan peradilan dan keseimbangan antara alokasi sumber daya (ekuitas) dan kinerja (equality) (Viapina, 2020). Kemudian penelitian lain yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh manajemen publik baru antara realitas dan ilusi (Mauro, 2017), kinerja penganggaran (Klase, 2008), model perencanaan anggaran (Kung, Huang, & Cheng, 2013), akuntabilitas dan penerapan anggaran (Olurankinse & Oloruntoba, 2017), alokasi belanja modal (Ogujiuba & Ehigiamusoe, 2014), Cost Control and Accountability (Lawyer, 2014), sistem pengendalian internal (Mattoasi, Musue, & Rauf, 2021).

Perencanaan anggaran merupakan subsistem perencanaan strategis (*strategic planning*), secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan (Latif, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setelah perencanaan anggaran disahkan langkah selanjutnya adalah tahap implementasi anggaran. Sistem pengukuran kinerja yang dilandasi oleh konsep value for money, dan anggaran yang berorientasi hasil yang menekankan pemikiran logis dan rasional dalam mengelola suatu perubahan dalam suatu organisasi. Organisasi kemudian dapat dimodifikasi dengan mengaplikasikan perencanaan rasional secara ilmiah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi keseluruhan organisasi (Julnes, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tindak lanjut dari implementasi anggaran adalah penyampaian laporan dalam hal ini meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mardiasmo, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Haryanto (2022) dalam penelitiannya yakni sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Proses akhir dari suatu anggaran adalah evaluasi anggaran yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen

yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan (Aji, 2015). Pada penelitian ini variabel teknologi informasi digunakan sebagai variabel pemoderasi dikarenakan dengan dilakukannya sistem perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi anggaran bila didukung oleh teknologi informasi maka akan menghasilkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dimana pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat (Aji, 2015).

Penelitian sehubungan dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi diantaranya Sudaryanti (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Winara & Putri, (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi sebagai pemoderasi dapat memperkuat hubungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan evaluasi, manfaat dengan akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dan Utami (2017) namun peneliti menambahkan variabel teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Kemudian peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Winara & Putri, (2019) namun peneliti menambahkan variabel pertanggungjawaban sebagai variabel bebasnya. Selanjutnya penelitian Sudaryanti (2013) namun yang membedakannya peneliti memecah variabel penganggaran menjadi perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang baik secara langsung maupun di moderasi oleh Teknologi Informasi?. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang baik secara langsung maupun di moderasi oleh Teknologi Informasi.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintahan Kota Palembang sebanyak 52 OPD. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pegawai yang memahami mengenai perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran serta memiliki pengalaman minimal selama 5 tahun dibidang tersebut. Sehingga diasumsikan masing-masing OPD diambil sebanyak 3 orang pegawai. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak $52 \times 3 = 156$ responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Outer Model

Pengujian model pengukuran (outer model) digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, meliputi:

Convergent Validity

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Outer Loadings

No	Perencanaan Anggaran	Implementasi Anggaran	Pelaporan Anggaran	Evaluasi Anggaran	Teknologi Informasi	Akuntabilitas Kinerja
1	0.718	-	-	0.818	0.729	0.735
2	0.713	0.817	0.711	-	0.713	0.718
3	0.715	0.775	0.889	0.725	0.727	0.717
4	0.760	0.736	0.865	-	0.736	0.719
5	0.726	0.849	0.886	0.882	0.704	0.741
6	0.787	-	0.889	0.796	0.733	0.748
7	0.865	-	0.751	-	0.742	0.742
8	0.784	-	-	-	0.737	0.719
9	-	-	-	-	0.752	0.723
10	-	-	-	-	0.793	0.738
11	-	-	-	-	0.712	0.724
12	-	-	-	-	0.726	0.732
13	-	-	-	-	0.711	0.767
14	-	-	-	-	0.740	-
15	-	-	-	-	0.728	-
16	-	-	-	-	0.721	-
17	-	-	-	-	0.751	-
18	-	-	-	-	0.736	-
19	-	-	-	-	0.716	-
20	-	-	-	-	0.724	-
21	-	-	-	-	0.751	-
22	-	-	-	-	0.737	-
23	-	-	-	-	0.707	-
24	-	-	-	-	0.712	-
25	-	-	-	-	0.708	-
26	-	-	-	-	0.745	-
27	-	-	-	-	0.741	-
28	-	-	-	-	0.727	-
29	-	-	-	-	0.733	-
30	-	-	-	-	0.719	-

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa terdapat indikator yang bernilai kurang dari 0.7 sehingga dinyatakan tidak valid. Adapun indikator tersebut yaitu pada variabel implementasi anggaran untuk pernyataan 1 bernilai 0.684, pada variabel pelaporan anggaran untuk pernyataan 1 bernilai 0,674, dan pada variabel evaluasi anggaran untuk pernyataan 2

(0,612) dan 4 (0.687). Untuk indikator-indikator yang tidak valid tersebut harus dikeluarkan dari model. Penghapusan indikator nantinya dilanjutkan dengan melakukan estimasi ulang atau re-estimasi. Re-estimasi atau melakukan estimasi ulang untuk evaluasi model pengukuran dimaksudkan untuk memeriksa kembali validitas outer factor setiap indikator. Berdasarkan perhitungan re estimasi diketahui semua variabel meliputi Perencanaan Anggaran (X_1), Implementasi Anggaran (X_2), Pelaporan Anggaran (X_3), Evaluasi Anggaran (X_4), Teknologi Informasi (M) dan Akuntabilitas Kinerja (Y) semua memiliki nilai outer loadings di atas 0.7 sehingga semua pernyataan dalam indikator pada variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Average Variance Extracted (AVE)

Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Smart PLS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas *Average Variance Extracted* (AVE)

No	Variabel	AVE	Keterangan
1	Perencanaan Anggaran	0.578	AVE > 0.5 = Valid
2	Implementasi Anggaran	0.633	AVE > 0.5 = Valid
3	Pelaporan Anggaran	0.697	AVE > 0.5 = Valid
4	Evaluasi Anggaran	0.652	AVE > 0.5 = Valid
5	Teknologi Informasi	0.534	AVE > 0.5 = Valid
6	Akuntabilitas Kinerja	0.537	AVE > 0.5 = Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa semua variabel yang meliputi variabel Perencanaan Anggaran (X_1), Implementasi Anggaran (X_2), Pelaporan Anggaran (X_3), Evaluasi Anggaran (X_4), Teknologi Informasi (M) dan Akuntabilitas Kinerja (Y) memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) semua lebih besar dari 0.5. Hal ini berarti bahwa semua konstruk telah tercapai syarat validitas konvergen sebab nilai AVE semuanya > 0,50.

Reliabilitas Konstruk

Construct reliability adalah mengukur reliabilitas konstruk variabel laten. Nilainya yang dianggap reliabel harus diatas 0.70. *Construct reliability* sama dengan *cronbach alfa*. Berdasarkan pengolahan data di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

No	Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
1	Akuntabilitas Kinerja (Y)	0.930	0.948	0.938
2	Perencanaan Anggaran (X_1)	0.899	0.960	0.916
3	Implementasi Anggaran (X_2)	0.814	0.862	0.873
4	Pelaporan Anggaran (X_3)	0.912	0.953	0.932
5	Evaluasi Anggaran (X_4)	0.824	0.859	0.882
6	Teknologi Informasi (M)	0.970	0.973	0.972

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa semua konstruk memiliki nilai cronbach's Alpha > 0,6 dan bahkan semuanya > 0,7, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk tersebut telah reliable.

Analisis Model Struktural (Inner Model)

F Square (Effect Size)

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai F square sebagai berikut:

Tabel 4. F Square

Variabel	Kinerja (Y)
Perencanaan Anggaran (X ₁)	0.013
Implementasi Anggaran (X ₂)	0.008
Pelaporan Anggaran (X ₃)	0.050
Evaluasi Anggaran (X ₄)	0.030
Teknologi Informasi (M)	0.229

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 4 nilai F Square diatas, untuk variabel Perencanaan Anggaran dan Implementasi Anggaran memiliki nilai f^2 berada dalam rentang 0,02 sd 0,15 yang berarti memiliki efek size (pengaruh) yang kecil terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y). Variabel Evaluasi Anggaran memiliki nilai f^2 berada pada rentang 0,15 sd 0,35 yang berarti memiliki efek size (pengaruh) yang sedang terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y). Kemudian untuk variabel Pelaporan Anggaran dan Teknologi Informasi memiliki nilai f^2 di atas 0,35 yang berarti memiliki efek size (pengaruh) yang besar terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

R Square

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. R Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Kinerja	0,429	0,391

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai R Square sebesar 0,429 yang berarti bahwa kemampuan variabel Perencanaan Anggaran (X₁), Implementasi Anggaran (X₂), Pelaporan Anggaran (X₃), Evaluasi Anggaran (X₄), Teknologi Informasi (M) dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) adalah sebesar 42,9% lebih kecil dari 50% maka pengaruh semua konstruk eksogen Perencanaan Anggaran (X₁), Implementasi Anggaran (X₂), Pelaporan Anggaran (X₃), Evaluasi Anggaran (X₄), Teknologi Informasi (M) dalam kategori lemah atau kecil, sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti redesain sistem penganggaran dan lainnya.

Asumsi Partial Least Square

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil *collinearity statistics* (VIF) sebagai berikut.

Tabel 6. Inner VIF Values

Variabel	Kinerja (Y)
Perencanaan Anggaran (X ₁)	1.769
Implementasi Anggaran (X ₂)	1.515
Pelaporan Anggaran (X ₃)	1.866
Evaluasi Anggaran (X ₄)	2.145
Teknologi Informasi (M)	2.341

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel inner VIF di atas, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai VIF < 5 sehingga semua variabel penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil pengujian hitpotesis sebagai berikut:

Tabel 9. Path Coefficient

Variabel	T Statistik	P Value
Perencanaan Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	1.354	0.176
Implementasi Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	0.775	0.438
Pelaporan Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	1.952	0.051
Evaluasi Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja	1.578	0.115
Teknologi Informasi -> Akuntabilitas Kinerja	4.304	0.000
Moderasi PA*TI	2.240	0.026
Moderasi IA*TI	0.643	0.520
Moderasi LA*TI	0.045	0.964
Moderasi EA*TI	2.208	0.028

Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)

Berdasarkan tabel 9 di atas maka dapat diuraikan pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel Perencanaan Anggaran sebesar $1.354 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.176 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Perencanaan Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel Implementasi Anggaran sebesar $0.775 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.438 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Implementasi Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel Pelaporan Anggaran sebesar $1.952 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.051 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Pelaporan Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel Evaluasi Anggaran sebesar $1.578 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.1115 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Evaluasi Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel Teknologi Informasi sebesar $4.304 > 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel moderasi

Teknologi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $2.240 > 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.026 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi mampu memoderasi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

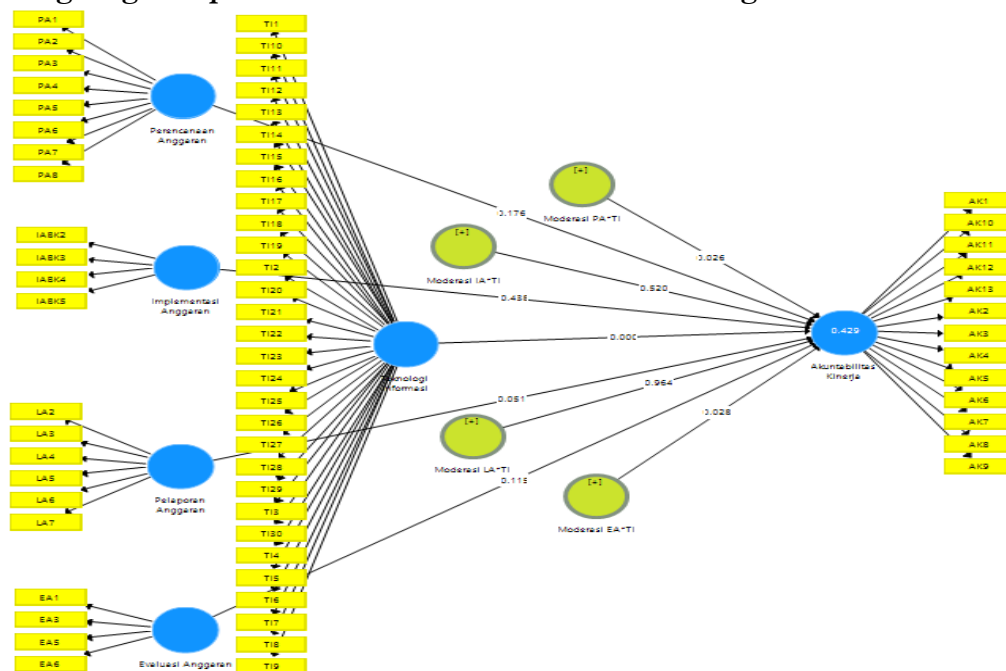
Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $0.643 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.520 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi atas hubungan Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $0.045 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.964 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi atas hubungan Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai T statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $2.208 > 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.028 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi mampu memoderasi atas hubungan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengaruh masing-masing variabel eksogen secara langsung terhadap variabel endogen dapat digambarkan secara garis besar pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen Baik Secara Langsung Maupun di Moderasi oleh Variabel Teknologi Informasi



PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan Anggaran Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel Perencanaan Anggaran sebesar $1.354 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.176 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Teori keagenan menjelaskan bahwa di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal, dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi self interestnya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif (Smith, 2013).

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini dikarenakan hubungan pemerintah antara eksekutif (agen) dan legislatif (prinsipal) dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh pemerintah memiliki muatan mengutamakan kepentingannya dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu maka pemerintah mengajukan anggaran yang dapat memperbesar kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugasnya baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi self interestnya. Pada akhirnya pemerintah dalam menyusun perencanaan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Faktor lainnya yang menyebabkan perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja adalah adanya pandemi covid 19 yang dimulai sejak awal tahun 2020 yang berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Pemerintah Pusat menekankan pentingnya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah yang semula digunakan untuk keperluan-kegiatannya dialihkan dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap capaian kinerja yang telah ditentukan di awal, dimana terdapat beberapa sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai oleh Pemerintah Kota Palembang. Kemudian Pemerintah Kota Palembang belum secara maksimal melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang belum selaras dengan sasaran Pemerintah Kota Palembang.

Perencanaan anggaran yang telah disusun Pemerintah Kota Palembang mengalami kendala yaitu adanya evaluasi APBD perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 tahun 2017, terkait pedoman evaluasi raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan raperda kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Permasalahan lain dalam penyusunan belanja daerah adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang baru

ditetapkan setelah OPD terkait telah menyusun anggaran program dan kegiatannya sehingga hal tersebut menyebabkan OPD harus merevisi kembali program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dianggarkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik, (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Implementasi Anggaran Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel Implementasi Anggaran sebesar $0.775 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.438 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Teori keagenan menjelaskan prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia dan McCubbins menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai agen diberikan wewenang untuk mengimplementasikan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dan sebagai pertanggungjawabannya pemerintah diminta untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerjanya (Lupia, 2013).

Penelitian ini menunjukkan implementasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Palembang belum mampu mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan efektif, dimana pengimplementasian anggaran berbasis kinerja tercermin dari tindakan OPD yang belum mampu melakukan penghematan biaya atas pelaksanaan program-program kerja dimana semua biaya dikeluarkan sesuai anggaran yang telah ditetapkan tanpa adanya efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini juga terlihat dari kurangnya komitmen dari pimpinan beberapa organisasi perangkat daerah serta kapabilitas pejabat yang membidangi terhadap akuntabilitas kinerja.

Kemudian faktor lainnya adalah penyerapan anggaran yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 95,5% menjadi 90,55% ditahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 78,81% ditahun 2020 kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 78,81%. Penyebab dari tingkat penyerapan anggaran di Kota Palembang kurang baik dimana terdapat beberapa OPD belum mencapai kriteria realisasi anggaran. Kendala yang dialami saat ini yaitu terkait penginputan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang yang masih lambat. Kendala lainnya yang timbul adalah kesulitan para OPD dalam menentukan prioritas kegiatan yang harus dianggarkan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya plafon anggaran terlebih dahulu sebelum disusunnya RKA-OPD. Banyaknya revisi program dan kegiatan anggaran mengakibatkan memakan banyak waktu yang berdampak terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran yang berpotensi anggaran tidak terserap dengan baik dan kurangnya manfaat dari anggaran tersebut bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin et al., (2017)

menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Pelaporan Anggaran Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel Pelaporan Anggaran sebesar $1.952 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.051 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pelaporan Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Teori keagenan menjelaskan pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal dan pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerjanya, pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk berikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2013).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan anggaran secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang. Hal ini dikarenakan dalam rangka mencapai kinerja anggaran pada pemerintah perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam kinerja anggaran. Dengan adanya laporan pengelolaan anggaran yang baik dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang terlatih, sangat dibutuhkan dalam laporan pengelolaan anggaran pada pemerintah dikarenakan apabila kualitas sumber daya manusia tidak memiliki latar belakang Pendidikan, pemahaman, pelatihan, serta kesiapan maka dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Sehubungan hasil pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan permasalahan, yaitu pemerintah daerah belum menemukan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, dikarenakan masih banyak Sumber Daya Manusia yang bukan berlatar belakang ilmu akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang ada dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan kinerja anggaran yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari masih relatif lambatnya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palembang, ditambah lagi dengan adanya mutasi beberapa sumber daya manusia sebagai pengelola atau penatausaha keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia, (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel Evaluasi Anggaran sebesar $1.578 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.1115 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Evaluasi Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Teori agensi menggambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Rakyat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik. Legislatif sebagai wakil rakyat dalam mengukur, menilai, mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Brigham, 2004).

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Palembang. Hal ini dikarenakan masih kurang optimalnya koordinasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pencapaian sasaran kinerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Palembang sehingga berdampak terhadap kurangnya kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan anggaran untuk periode berikutnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Teknologi Informasi Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel Teknologi Informasi sebesar $4.304 > 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Pada teori keagenan manajemen dilabeli “agent” sedangkan pemilik dicap “principal”. Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi perantara (agen) memiliki wewenang dalam menyediakan data transparan dan akurat kepada masyarakat sebagai prinsipal sehingga dengan masyarakat mampu memahami dan melakukan evaluasi atas berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diemban (Brigham, 2004). Sistem Pemerintahan Daerah Kota Palembang saat ini telah diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan yaitu penerapan *electronic-government* (*e-government*). Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan OPD yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam reformasi birokrasi untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Di era keterbukaan informasi sekarang ini, penggunaan TIK dinilai dapat mempersingkat proses kerja birokrasi pemerintah dan memungkinkan adanya transparansi tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan TIK juga mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat. Publik bisa memanfaatkan TIK untuk ikut memantau dan mengawasi kinerja pemerintah. Dalam menciptakan iklim reformasi birokrasi yang baik dan kondusif, Pemerintah Kota Palembang membuat inovasi dalam tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dengan nama E-Sakip. E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kota Palembang pada umumnya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harianto et al., (2021) dan Septiyani et al., (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai *T* statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $2.240 > 1.96$ dengan nilai *P Value* sebesar $0.026 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi mampu memoderasi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi disebut sebagai moderasi semu (*quasi moderator*) dimana variabel teknologi informasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel perencanaan anggaran (X_1) dengan variabel akuntabilitas kinerja (Y) yang sekaligus menjadi variabel independen.

Teori keagenan mengharuskan pemerintah sebagai agen bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerjanya. Jika agen ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran serta mempunyai informasi khusus tentang kondisi unit organisasinya, maka hal ini akan memungkinkan agen dapat memberikan informasi yang dimilikinya untuk membantu organisasinya (Brigham, 2004). Guna menjamin informasi tersedia dengan baik maka diperlukan teknologi informasi dimana menurut PP No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD. Penerapan SIKD yang tepat akan sangat membantu penyusunan anggaran yang berkualitas. Anggaran yang berkualitas, dilihat dari beberapa hal antara lain konsistensi dalam penggunaan dokumen-dokumen penganggaran sesuai aturan yang berlaku, ketertiban jadwal dalam penyusunan anggaran, pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada aplikasi E-Sakip ditampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Data hasil input di dalam E-Sakip dapat diunduh, yang format hasil unduhan dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah diinput oleh masing-masing Perangkat Daerah menjadi database Pemerintah Daerah masing-masing serta dapat dilihat atau diubah pada tahun-tahun berikutnya.

E-sakip merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Diharapkan dengan diterapkannya E-Sakip dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM dan penguatan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kota Palembang.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan P. Winara & Putri, (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi atas hubungan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Implementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai *T* statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $0.643 < 1.96$ dengan nilai *P Value* sebesar $0.520 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi atas hubungan Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi hanya sebagai prediktor moderasi (*predictor moderator*) dimana variabel teknologi informasi hanya berperan sebagai variabel prediktor (*independen*) dalam model hubungan yang dibentuk.

Pada teori keagenan pengkomunikasian *principal* dan *agent* tidak selamanya mempunyai tujuan yang senada dalam pelaksanaan anggaran. Pada kenyataannya masing-masing baik *principal* dan *agent* mempunyai *self interest* (kepentingan pribadi) yang ingin dicapai. Dari sinilah muncul *principal-agent conflict* (konflik *principal* dan *agent*). Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu teknologi informasi yang mampu menyakinkan bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan secara terbuka. Salah satu kegiatan pelaksanaan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Brigham, 2004).

Aplikasi esakip merupakan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD Kota Palembang. Informasi yang terdapat di E-Sakip Kota Palembang dapat diakses Publik dengan harapan masyarakat Kota Palembang dapat memantau langsung menilai serta dapat memberi kritik dan saran untuk OPD yang kinerjanya kurang maksimal dalam hal capaian kinerja. Aplikasi E-Sakip ini menampilkan beberapa fitur dan informasi secara *Real Time* yang meliputi sebagai berikut: RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RENSTRA (Rencana Strategis)

OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang. Hal ini dikarenakan masih ada Organisasi Perangkat Daerah belum secara optimal memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai sistem aplikasi yang membantu perencanaan, penyelarasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja. Belum optimalnya penggunaan E Sakip ini dikarenakan kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangnya. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki. Pada beberapa OPD rata-rata hanya memiliki 1-2 personil atau tenaga teknis sementara beban tugas pokok dan fungsi cukup banyak. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan E Sakip terutama oleh pelaksana teknis.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan Winara & Putri, (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi atas hubungan pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Pelaporan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $0.045 < 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.964 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi atas hubungan Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi hanya sebagai prediktor moderasi (*predictor moderator*) dimana variabel teknologi informasi hanya berperan sebagai variabel prediktor (*independen*) dalam model hubungan yang dibentuk.

Pada teori keagenan, konsekuensinya pada proses pelaporan anggaran, agent bisa saja melakukan berbagai intervensi terkait dengan self interest agent, begitu pula dengan principal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan principal dan agent dalam pelaporan anggaran diantaranya adalah adanya asymmetry information dan kepentingan jangka pendek yang pada akhirnya akan memberikan dampak kepada perilaku korupsi. Asymmetry information akan terjadi karena dalam pelaksanaan anggaran oleh agen, principal memerlukan laporan pertanggungjawaban dari aktifitas yang dikelola oleh agent (Brigham, 2004). Untuk mengatasi asymmetry informasi maka diperlukan teknologi informasi yang menjamin bahwa pelaporan anggaran telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu maka pemerintah Kota Palembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum mampu memoderasi hubungan antara pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaksana teknis yang memadai serta masih kurangnya jumlah personil yang dimiliki pada bidang/seksi pelaksana teknis merupakan kendala yang menghambat penggunaan E Sakip, akibatnya seringkali terjadi kesalahan dan keterlambatan pada pelaporan LAKIP. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam pelaporan LAKIP. Ada kesulitan yang

dihadapi pelaksana teknis dalam proses menghimpun data dari bidang lain pada 1 OPD, sehingga hal ini membuat pekerjaan menyusun LAKIP menjadi terhambat, dan mengakibatkan OPD seringkali terlambat dalam menyampaikan LAKIP ke Bagian Organisasi untuk dikompilasi menjadi LAKIP tahunan pemerintah daerah. Untuk tercapainya pelaporan LAKIP OPD yang tepat waktu sangat diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dalam satu OPD. Ketepatanwaktuan menjadi salah satu unsur penilaian LAKIP pemerintah daerah, apabila LAKIP OPD terlambat diterima, akibatnya Bagian Organisasi juga akan mengalami keterlambatan dalam melaporkan LAKIP Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan Winara & Putri, (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi atas hubungan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nilai T statistik untuk variabel moderasi Teknologi atas hubungan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $2.208 > 1.96$ dengan nilai P Value sebesar $0.028 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi mampu memoderasi atas hubungan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi disebut sebagai moderasi semu (*quasi moderator*) dimana variabel teknologi informasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel evaluasi anggaran (X_4) dengan variabel akuntabilitas kinerja (Y) yang sekaligus menjadi variabel independen.

Pada teori keagenan hubungan agensi timbul ketika pemerintah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, dimana hubungan agency merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implicit dimana principal akan meminta agen untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan atas nama principal. Dengan adanya teori keagenan dapat digunakan dalam membantu melakukan evaluasi untuk memahami adanya indikasi hasil yang masih saling bertentangan mengenai hubungan antara anggaran dengan senjangan anggaran. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain dalam melihat hubungan kedua variabel tersebut. Pendekatan lain tersebut meliputi penggunaan model keagenan atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi sebagai prediktor adanya senjangan anggaran (Anthony & Govindarajan, 2015). Evaluasi anggaran memandang keseluruhan aktivitas yang dilakukan hingga terhadap hasil dari program pembangunan. Evaluasi dilakukan pada periode tertentu, biasanya dilakukan di awal kegiatan (pra-evaluation), ditengah kegiatan (middle evaluation) dan di akhir kegiatan (final evaluation). Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi hasil. Pengukuran dalam evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara standard dengan hasil (antara rencana dengan realisasi) sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya kesenjangan anggaran. Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi tersebut maka dibutuhkan teknologi informasi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diperoleh secara cepat, tepat dan akurat dan mampu menghasilkan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan P. Winara & Putri, (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi atas hubungan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Secara langsung hanya variabel teknologi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan variabel perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Teknologi informasi hanya mampu memoderasi hubungan variabel perencanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja sedangkan variabel lainnya teknologi informasi tidak mampu memoderasinya.

Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas kinerja yang didasarkan pada perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran dengan variabel teknologi informasi sebagai variabel moderasi hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi serta menambah variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel bebasnya, kemudian objek penelitiannya diperluas yaitu di Indonesia.

REFERENSI

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Aji, S. (2015). *Pengantar Teknologi Informasi*. Semarang: Salembah Infotik.
- Anastasia, D. R. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Anisa, I. N., & Haryanto. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Anthony, & Govindarajan. (2015). *Management Control System* (Edisi Pert). Jakarta: Salemba Empat.
- Bagian Organisasi Setda Kota Palembang. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020*.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Brigham, E. F. and J. F. H. (2004). *Fundamentals of Financials Management* (Ten Editio). Jakarta: Thomson: South Western.
- Damanik, R. H. (2018). Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *JAKK (JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN KONTEMPORER)*, 1(1), 89–110.
- Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 577–586.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *JOM FEKON*, 4(1).

- Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 104–116.
- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP). *JAA*, 6(1), 122–139.
- Julnes, P. deL. and M. H. (2011). Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations, An Empirical Study of Faktor Affecting Adaptation and Implementation. *Public Administration Review*, 61(6).
- Kenis, I. (2019). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attituteds and Performance. *The Accpoting Review*, 14(4), 172–189.
- Klase, K. A. (2008). The Impact Of Performance Budgeting On State Budget Outcomes. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 20(3), 277–298.
- Kung, F.-H., Huang, C.-L., & Cheng, C.-L. (2013). An examination of the relationships among budget emphasis, budget planning models and performance. *Emerald*, 51(1).
- Latif. (2014). *Perencanaan Anggaran*. Yogyakarta: BPFE.
- Lawyer, C. O. (2014). Cost Control and Accountability for Effective Budget Implementation. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(21), 199–202.
- Lupia, A. & M. M. (2013). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing* (Second edi). Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Mahpudin, E., Santoso, M. P. T., & Huda, S. (2017). Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Instansi Pemerintah Daerah). *JRKA*, 3(2), 1–19.
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ket). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mattoasi, Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mauro, S. G. (2017). Manajemen Publik Baru Antara Realitas dan Ilusi: Menganalisis Validitas Penganggaran Berbasis Kinerja. *Tinjauan Akuntansi Inggris*. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007%0A>
- Ogujiuba, K. K., & Ehigiamusoe, K. (2014). Capital Budget Implementation in Nigeria: Evidence from the 2012 Capital Budget. *CONTEMPORARY ECONOMICS*, 8(3), 299–314.
- Olurankinse, F., & Oloruntoba, S. R. (2017). Empirical Analysis of the Effect of Accountability on Budget Implementation in Ondo State Nigeria. *Canadian Social Science*, 13(3), 27–32.
- Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4083–4094.
- Septiyani, G., Taufik, T., & Julita. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan. *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(2), 183–200.
- Smith, R. W. & M. B. (2013). *Principals and agents: An explanatory model of public budgeting*. Washington, D.C.: Chatham House Publishers, Inc.

- Staf Kepresidenan Republik Indonesia. (2022). *Capaian Kinerja Indonesia*. Jakarta.
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–24.
- Utami, E. F. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *JOM FEB*, 7(2), 1–15.
- Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA*, 2(4), 56–68.
- Viapina, F. (2020). Anggaran Berbasis Kinerja di Peradilan: Alokasi Sumber Daya dan Variabilitas Kinerja di Pengadilan Tingkat Pertama (Sebuah Analisis Tiga Studi Kasus). *JPBAFM*, 33(2).
- Wibisono, S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1–22.
- Winara, P., & Putri, R. S. (2019). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi dan Tunjangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Sekretariat BPSDM Perhubungan. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 2(2), 186–202.
- Yuliani, N. L. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 301–312.